

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). Rumah Tidak Layak Huni. <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/798>. Diakses pada 9 Maret 2021.
- Data Pembangunan Tahun 2019, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember.
- Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Pemukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. 2016. "Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni" : Bandung, Jawa Barat.
- Logandeng. 2017. Pembangunan Desa Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). <http://logandeng.sideka.id/2017/10/11/pembangunan-desa-rumah-tidak-layak-huni-rtlh/>. Diakses Pada 8 Maret 2021.
- SIPP KEMENPAN RB. Dinas Perumahan dan Pemukiman. <https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/jawa-timur/kabupaten-jombang/pengajuan-permohonan-rehabilitasi-rumah-tidak-layak-huni-rtlh>. Diakses pada 8 Maret 2021.
- Dewi, A, M, dan Prabawati, I. 2013. Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun. Repository Unibraw, 1. 1-15. Diakses pada 11 Maret 2021.
- Huda, Nurul. 2020. Implementasi Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) di Desa Maos Kidul Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap Dalam menanggulangi Kemiskinan. Fakultas Dakwah. IAIN Purwokerto, Jawa Tengah.
- Ismowati, Mary, Ahmad Subhan. 2018. Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Padeang. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Jakarta, Indonesia.
- Sutrisno, Haikal. 2021. Dugaan Korupsi Bedah Rumah, Polisi Periksa Pejabat Pemkab Jember. Diakses pada 17 Maret 2021. Hadi, Nur. 2020. Tim Sukses di Rumah Tidak Layak Huni. Diakses pada 17 Maret 2021.

Safi_i,2019. Implementasi program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)di Kecamatan Bagan Sinema Dalam menanggulangi Masyarakat kurang mampu. Falkutas ilmu sosisal dan ilmu politik.UNIVERSITAS MEDAN AREA.

Syahrin, A.2003. Peraturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan.Jember .

Winamo, B. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressido

Wawan, 2012. EVALUASI: Teori, Model, Standart, dan Profesi, Depok: PT. RajaGofindo Persada

Adam, B. 2003. Peraturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan. Jember: Pustaka Bangsa Press.

Sofian Efendi dan Tukiran.2012. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3LP5

Indra, M, dan Endi Marlina, 2006. *Perencanaan dan Pembangunan Perumahan*. Jakarta: Rajawali Prees

Referensi Peraturan-Peraturan, Lembaga dan Dokumen

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rebuplik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020.

Permen PURR Nomor 8 Tahun 2020.

Tursilarini, tateki yoga, Trilaksmi Udiati. 2020. Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) Bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Bangka. Sonosewu Yogyakarta, Indonesia.

Zania Rahmawati, Efektifitas Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Bansos-RTLH), dimuat dalam e- journal3 (volume. 1 Nomor2, Desember 2018). Diakses pada 11 Maret 2021.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawassan Permukiman

Adawiyah, P. R., Ardiansyah, F.,& Haerah, K. (2021). Implementation of Artifical Intelligence: The Use Technology on Diffable Public Service in Banyuwangi. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 717(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012046>

Skripsi

Skripsi Khor, 2013. Analisis Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2011 Di Desa Teluk Siantar Kecamatan Sialan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau.

